

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Masyarakat Minangkabau adalah salah satu etnis yang memiliki sistem kekerabatan yang unik. Minangkabau seyogianya tidak mengenal sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja seperti kebanyakan daerah di Indonesia. Ia merupakan sebuah wilayah yang otonom yang disebut dengan nagari. Wilayah ini memiliki otoritas dibawah kepemimpinan seorang penghulu. Khusus di kota Padang dikenal dengan Kepemimpinan Penghulu Delapan Suku. Dengan beberapa kali terjadinya kebijakan tentang perluasan kota Padang, menyebabkan secara teritorial kewilayahan Delapan Suku menjadi mengecil. Namun, mereka tetap memiliki wewenang pada nagari wilayah sejak semula yang dihuni oleh turunan dari Delapan Suku tersebut.

Seiring dengan masyarakat kota Padang yang pluralistik, dimana di sini tidak bermukim hanya masyarakat asli Minangkabau yang dari daerah asalnya, tetapi juga kota Padang dihuni oleh penduduk etnis lainnya, seperti etnis Cina, Jawa, Nias, dan India. Dalam kondisi ini, Penghulu Delapan Suku, pada umumnya memiliki wilayah otoritas yang dianggap sebagai penghuninya adalah penduduk asli yang berasal dari Kubung Tiga Belas. Wilayah tersebut adalah sekitar, Seberang Padang, Ganting, Alang Laweh, dan Marapalam.

Penghulu-penghulu suku memiliki peran ganda yaitu sebagai kepala suku dalam kaumnya dan juga sebagai alat administrasi pemerintah kolonial. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena kekuasaan mereka tidak sebesar pemerintah kolonial. Mereka dianggap sebagai elit tradisional yang strategis karena terpilih sebagai orang yang memiliki kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain

sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari kaumnya. Dari beberapa pemikiran di atas memberikan sebuah gambaran bahwa peranan elit tradisional dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan. Sebagai tokoh yang berpengaruh, elit dapat mendorong massa menuju kepada arah untuk mewujudkan kepentingannya.

Berlanjutnya pemerintahan sebagai unit administrasi menunjukkan kokohnya fondasi otoritas elite tradisional sehingga dapat menyesuaikan dengan praktek pemerintah kolonial yang berlangsung dinamis. Pemerintah Kolonial bukan saja memanfaatkan para elite tradisional untuk tujuan dan kepentingannya, namun lebih dari itu, mengakuinya sebagai unit administrasi yang otonom.

